

PERUBAHAN RENJA

Rencana Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul

Tahun 2026



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat sehingga perlu dilakukan penyesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2026.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : PENUTUP
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 21 Agustus 2026

BUPATI BANTUL



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 21 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 59

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026. Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Setwan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat

Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 51);
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Setwan Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Setwan Tahun 2026 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Setwan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

Evaluasi Renja Setwan Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Setwan. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Setwan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA- SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/ d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 12		15=14/5 x100%		16	17
	4.02	SEKRETARIAT DPRD			259.226.815.513		44.499.163.592		51.505.181.484		8.987.016.131		11.740.306.209		20.727.322.340	45,85	40,24		20.727.322.340	16,33	8		
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			180.924.210.427		33.791.929.376		34.724.023.584		7.368.158.399		9.527.070.226		16.895.228.625	50,86	48,66		16.895.228.625	23,16	9,34	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	94,77		0		92,55		0		64,67		64,67		69,88		64,67		68,24			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	82,2		0		82,00		0		81,6		81,6		99,51		81,6		99,27			
	4.02.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			280.500.000		38.632.500		49.964.500		8.892.500		2.762.500		11.655.000	25	23,33		11.655.000	5	4,16		
		Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	25		5		5		0		0		0		0		0		0			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	30		5		6		2		1		3		50		3		10			
	4.02.01.2. 01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			140.250.000		19.240.000		25.272.000		3.240.000		-		3.240.000	0	12,82		3.240.000	0	2,31		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	25		5		5		0		0		0		0		0		0			
	4.02.01.2. 01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			140.250.000		19.392.500		24.692.500		5.652.500		2.762.500		8.415.000	50	34,08		8.415.000	10	6		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	30		5		6		2		1		3		50		3		10			
	4.02.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			33.255.157.798		5.753.004.737		6.560.915.796		428.584.998		2.660.828.345		3.089.413.343	64,29	47,09		3.089.413.343	39,52	9,29		
		Terlaksananya kegiatan Administrasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	39		39		39		39		39		39		100		39		100			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA- SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/ d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 12		15=14/5 x100%		16	17
		Keuangan Perangkat Daerah	dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)																				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60		12		12		3		3		6		50		6		10			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD (Laporan)	105		21		21		4		5		9		42,86		9		8,57			
	4.02.01.2. 02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			32.452.558.729		5.622.489.737		6.402.325.796		396.652.498		2.634.165.845		3.030.818.343	100	47,34		3.030.818.343	100	9,34		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	39		39		39		39		39		39		100		39		100			
	4.02.01.2. 02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			662.349.069		110.980.000		133.600.000		27.305.000		24.400.000		51.705.000	50	38,7		51.705.000	10	7,81		
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	60		12		12		3		3		6		50		6		10			
	4.02.01.2. 02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			140.250.000		19.535.000		24.990.000		4.627.500		2.262.500		6.890.000	42,86	27,57		6.890.000	8,57	4,91		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD (Laporan)	105		21		21		4		5		9		42,86		9		8,57			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA- SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/ d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 12		15=14/5 x100%		16	17
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			851.386.698		209.920.000		195.824.000		16.500.000		41.433.850		57.933.850	30	29,58		57.933.850	6	6,8		
		Terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	200		40		40		10		2		12		30		12		6			
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			851.386.698		209.920.000		195.824.000		16.500.000		41.433.850		57.933.850	30	29,58		57.933.850	6	6,8		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	200		40		40		10		2		12		30		12		6			
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.704.163.315		1.565.811.962		1.332.656.356		462.402.930		90.798.000		553.200.930	61,58	41,51		553.200.930	32,29	9,7		
		Terlaksannanya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	35		7		19		5		6		11		57,89		11		31,43			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		2		2		2		2		2		100		2		100			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	60		12		12		3		3		6		50		6		10			
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.109.141.718		1.170.575.400		967.544.356		413.357.930		52.112.500		465.470.430	57,89	48,11		465.470.430	31,43	11,33		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35		7		19		5		6		11		57,89		11		31,43			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/ d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA- SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/ d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 12		15=14/5 x100%		16	17
			yang Disediakan (Paket)																				
	4.02.01.2. 06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			350.000.000		67.660.000		69.800.000		16.140.000		16.185.000		32.325.000	100	46,31		32.325.000	100	9,24		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		2		2		2		2		2		100		2		100			
	4.02.01.2. 06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			569.726.676		157.317.500		50.000.000		14.250.000		-		14.250.000	50	28,5		14.250.000	10	2,5		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10			
	4.02.01.2. 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			635.294.921		163.371.562		237.312.000		16.842.500		21.000.500		37.843.000	50	15,95		37.843.000	10	5,96		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10			
	4.02.01.2. 06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			40.000.000		6.887.500		8.000.000		1.812.500		1.500.000		3.312.500	50	41,41		3.312.500	10	8,28		
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	60		12		12		3		3		6		50		6		10			
	4.02.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.366.774.370		1.473.444.305		1.646.017.400		284.332.222		397.441.694		681.773.916	50	41,42		681.773.916	10	8,15		
		Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	60		12		12		3		3		6		50		6		10			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/ d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA- SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/ d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 12		15=14/5 x100%		16	17
			Kantor yang Disediakan (Laporan)																				
	4.02.01.2. 08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			77.280.226		13.308.356		21.587.200		5.101.365		4.066.112		9.167.477	50	42,47		9.167.477	10	11,86		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10			
	4.02.01.2. 08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			573.384.064		73.910.000		145.141.400		15.894.000		17.405.000		33.299.000	50	22,94		33.299.000	10	5,81		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10			
	4.02.01.2. 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			7.716.110.080		1.386.225.949		1.479.288.800		263.336.857		375.970.582		639.307.439	50	43,22		639.307.439	10	8,29		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3		6		50		6		10			
	4.02.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.747.013.265		706.822.073		939.254.620		92.208.893		157.586.647		249.795.540	61,38	26,6		249.795.540	12,28	5,26		
		Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	20		6		4		1		1		2		50		2		10			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	205		41		41		3		11		14		34,15		14		6,83			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/ d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA- SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/ d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 12		15=14/5 x100%		16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	30		6		6		6		0		6		100		6		20			
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.160.899.164		219.559.245		370.325.650		34.401.163		66.946.657		101.347.820	50	27,37		101.347.820	10	8,73		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	20		6		4		1		1		2		50		2		10			
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2.557.788.552		331.878.161		425.096.150		33.293.730		88.239.990		121.533.720	34,15	28,59		121.533.720	6,83	4,75		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	205		41		41		3		11		14		34,15		14		6,83			
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.028.325.549		155.384.667		143.832.820		24.514.000		2.400.000		26.914.000	100	18,71		26.914.000	20	2,62		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	30		6		6		6		0		6		100		6		20			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA- SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/ d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 12		15=14/5 x100%		16	17
			hukum fungsi pengawasan dan penganggaran (%)																				
	4.02.02.2 .01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			14.616.530.685		1.832.904.342		3.792.064.400		119.529.200		414.271.000		533.800.200	34,72	14,08		533.800.200	6,44	3,65		
		Terlaksananya Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	30		6		6		1		1		2		33,33		2		6,67			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	45		9		9		1		4		5		55,56		5		11,11			
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan (Dokumen)	25		4		4		1		1		2		50		2		8			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	25		5		5		0		0		0		0		0		0			
	4.02.02.2. 01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			6.866.267.509		767.379.722		1.499.252.000		17.602.500		10.855.000		28.457.500	33,33	1,9		28.457.500	6,67	0,41		
		Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	30		6		6		1		1		2		33,33		2		6,67			
	4.02.02.2. 01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			6.501.223.739		964.751.800		2.118.561.500		96.489.200		366.016.000		462.505.200	55,56	21,83		462.505.200	11,11	7,11		
		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	45		9		9		1		4		5		55,56		5		11,11			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/ d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA- SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/ d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	4.02.02.2. 01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan			540.961.581		60.512.500		66.602.400		5.437.500		24.910.000		30.347.500	50	45,57		30.347.500	8	5,61		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan (Dokumen)	25		4		4		1		1		2		50		2		8			
	4.02.02.2. 01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterang an Naskah Akademik			708.077.856		40.260.320		107.648.500		-		12.490.000		12.490.000	0	11,6		12.490.000	0	1,76		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	25		5		5		0		0		0		0		0		0			
	4.02.02.2 .02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			8.321.349.817		1.444.983.580		2.268.853.000		810.000		123.166.600		123.976.600	0	5,46		123.976.600	0	1,49		
		Terlaksananya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	40		8		8		0		0		0		0		0		0			
	4.02.02.2. 02.0003	Pembahasan APBD			8.321.349.817		1.444.983.580		2.268.853.000		810.000		123.166.600		123.976.600	0	5,46		123.976.600	0	1,49		
		Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	40		8		8		0		0		0		0		0		0			
	4.02.02.2 .03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			10.753.886.620		1.304.862.002		2.443.751.000		236.732.400		324.392.500		561.124.900	56,25	22,96		561.124.900	11,25	5,22		
		Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	80		16		16		4		5		9		56,25		9		11,25			
	4.02.02.2. 03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran			10.753.886.620		1.304.862.002		2.443.751.000		236.732.400		324.392.500		561.124.900	56,25	22,96		561.124.900	11,25	5,22		
		Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	80		16		16		4		5		9		56,25		9		11,25			
	4.02.02.2 .04	Peningkatan Kapasitas DPRD			18.631.155.887		3.132.220.957		3.647.405.000		437.015.200		926.464.904		1.363.480.104	39,13	37,38		1.363.480.104	7,83	7,32		
		Terlaksananya Kegiatan Peningkatan	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman	30		6		6		2		2		4		66,67		4		13,33			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA- SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 12		15=14/5 x100%		16	17
		Kapasitas DPRD	Tugas DPRD (Dokumen)																				
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	210		1		42		6		0		6		14,29		6		2,86			
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	480		72		96		24		18		42		43,75		42		8,75			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	660		132		132		0		42		42		31,82		42		6,36			
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD			10.566.823.033		1.969.246.423		2.545.735.000		397.015.200		824.914.911		1.221.930.111	66,67	48		1.221.930.111	13,33	11,56		
		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	30		6		6		2		2		4		66,67		4		13,33			
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			1.575.000.000		1.500.000		20.000.000		3.000.000		3.000.000		6.000.000	14,29	30		6.000.000	2,86	0,38		
		Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	210		1		42		6		0		6		14,29		6		2,86			
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			1.278.750.000		224.500.000		255.750.000		37.000.000		36.750.000		73.750.000	43,75	28,84		73.750.000	8,75	5,77		
		Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	480		72		96		24		18		42		43,75		42		8,75			
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			5.210.582.854		936.974.534		825.920.000		-		61.799.993		61.799.993	31,82	7,48		61.799.993	6,36	1,19		
		Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	660		132		132		0		42		42		31,82		42		6,36			
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			8.924.595.854		1.449.885.000		736.137.500		233.350.000		887.500		234.237.500	75	31,82		234.237.500	15	2,62		
		Terlaksananya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	20		4		4		2		1		3		75		3		15			
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses			8.924.595.854		1.449.885.000		736.137.500		233.350.000		887.500		234.237.500	75	31,82		234.237.500	15	2,62		
		Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	20		4		4		2		1		3		75		3		15			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/ d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA- SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/ d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 12		15=14/5 x100%		16	17
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			1.422.546.022		98.983.350		278.571.000		300.000		27.731.800		28.031.800	0	10,06		28.031.800	0	1,97		
		Terlaksananya kegiatan pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	5		1		1		0		0		0		0		0		0			
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD			1.422.546.022		98.983.350		278.571.000		300.000		27.731.800		28.031.800	0	10,06		28.031.800	0	1,97		
		Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	5		1		1		0		0		0		0		0		0			
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			15.632.540.201		1.443.394.985		3.614.376.000		591.120.932		396.321.679		987.442.611	51,67	27,32		987.442.611	10,33	6,32		
		Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	100		20		20		5		1		6		30		6		6			
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	5		1		1		1		0		1		100		1		20			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	20		4		4		1		1		2		50		2		10			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	300		60		60		2		14		16		26,67		16		5,33			
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			10.653.629.127		881.170.855		2.180.565.500		429.466.025		189.554.672		619.020.697	30	28,39		619.020.697	6	5,81		
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	100		20		20		5		1		6		30		6		6			
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD			685.870.403		123.450.000		246.430.000		124.705.907		-		124.705.907	100	50,61		124.705.907	20	18,18		
		Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan	5		1		1		1		0		1		100		1		20			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/ d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA- SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/ d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 12		15=14/5 x100%		16	17
		Kelengkapan dan Kinerja DPRD	dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)																				
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			3.048.312.903		280.550.440		735.422.500		2.175.000		129.560.907		131.735.907	50	17,91		131.735.907	10	4,32		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	20		4		4		1		1		2		50		2		10			
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			1.244.727.768		158.223.690		451.958.000		34.774.000		77.206.100		111.980.100	26,67	24,78		111.980.100	5,33	9		
		Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	300		60		60		2		14		16		26,67		16		5,33			
					259,226,815,513		44,499,163,592		51,505,181,484		8,987,016,131		11.740.306.209		20,727,322,340				20,727,322,340				
																45,85	40,24			16,33	8		
																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		SUB KEGIATAN
																42,35				41,88			PROGRAM
																Sangat Rendah				Sangat Rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Dukungan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program dan kegiatan. 2. Komitmen pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan fasilitasi. 3. Koordinasi yang baik antara Sekretariat DPRD, perangkat daerah, dan DPRD. 4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung administrasi persidangan, produk hukum, dan pengelolaan dokumen. 5. Pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala. 6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai.																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Perubahan jadwal kegiatan DPRD yang dinamis sehingga memengaruhi pelaksanaan program. 2. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi tertentu. 3. Keterbatasan anggaran atau adanya efisiensi belanja yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan. 4. Koordinasi lintas perangkat daerah yang belum optimal, terutama dalam penyusunan bahan rapat dan produk hukum. 5. Perubahan regulasi yang memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan tugas dan administrasi. 6. Gangguan pada sistem informasi atau keterbatasan pemanfaatan teknologi. 7. Tingginya beban kerja pada masa pembahasan APBD, perubahan APBD, dan pembentukan peraturan daerah.																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA-SKPD berikutnya :																							

Sumber: SIPD Dalev Setwan Bantul per 13 Agustus 2026, 2026

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Setwan Tahun 2026 sampai dengan Trwiiwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), sehingga diperlukan penyesuaian program, kegiatan, dan alokasi anggaran agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan mendukung pencapaian target kinerja;
- b. Alokasi anggaran belanja makanan dan minuman pada subkegiatan masih belum mencukupi untuk mengakomodasi kebutuhan pelaksanaan kegiatan, sehingga berpotensi mempengaruhi kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan;
- c. Terbatasnya anggaran untuk media cetak mimbar legislatif sederhana menjadi salah satu kendala dalam mendukung publikasi, transparansi, dan diseminasi informasi kegiatan DPRD kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- d. Untuk meningkatkan kualitas layanan Pimpinan DPRD, diperlukan penambahan tenaga *outsourcing* sebagai tenaga pendukung dalam pelaksanaan tugas administratif, koordinasi, dan operasional sehari-hari;
- e. Pelaksanaan anggaran responsif gender belum dapat dilakukan secara optimal sesuai kebutuhan;
- f. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat DPRD, diperlukan penguatan pemahaman dan keterampilan aparatur dalam mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP dan Manajemen Risiko);
- g. Kebutuhan pemenuhan tenaga PPPK Paruh Waktu, alokasi anggaran yang tersedia masih belum mencukupi untuk mendukung pembiayaan secara optimal, sehingga diperlukan penambahan anggaran.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi penyesuaian target kinerja dan rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2026 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Penyesuaian target kinerja dan rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2026 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

3.1. Penyesuaian Rencana Kinerja Tahun 2026

Penyesuaian target kinerja pada Perubahan Renja Setwan Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Penyesuaian Target Kinerja pada Perubahan Renja Setwan Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2026	Penyesuaian Target Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Renstra Tahun 2025-2029				
	a. Persentase capaian produk hukum yang diterbitkan DPRD	Persen	100	100	100
	b. Indeks capaian fasilitasi produk hukum DPRD	Indeks	94,53	94,91	94,91

Sumber: Hasil Analisis Setwan Bantul, 2026

3.2. Perubahan Rencana Pendanaan Tahun 2026

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Setwan Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Setwan Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
															NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH							42.663.459.818	51.366.181.483,93	51.505.181.483,93	8.841.721.665,93							55.229.187.282	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							42.663.459.818	51.366.181.483,93	51.505.181.483,93	8.841.721.665,93							55.229.187.282	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							42.663.459.818	51.366.181.483,93	51.505.181.483,93	8.841.721.665,93							55.229.187.282	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)				82 angka	82 angka	15.725.326.418	34.246.521.083,93	34.724.023.583,93	29.523.609.961							45.248.936.379	
	4.02.01.2.01 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				85 persen	85 persen	53.040.000	49.980.000	49.964.500	-3.075.500			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Sekretariat DPRD	74.669.100	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	24.990.000	24.990.000	25.272.000	282.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		37.334.550	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.01 .0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	28.050.000	24.990.000	24.692.500	-3.357.500	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		37.334.550	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.02 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				85 persen	85 persen	6.565.141.453	6.460.915.795,93	6.560.915.795,93	-4.225.657,07			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Sekretariat DPRD	5.667.396.266	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	6.406.551.453	6.302.325.795,93	6.402.325.795,93	-4.225.657,07	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan		5.297.834.548	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.02 .0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	133.600.000	133.600.000	133.600.000	0	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan		336.286.718	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan				
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				21 Laporan	21 Laporan	24.990.000	24.990.000	24.990.000	0	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			33.275.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				85 persen	85 persen	234.956.000	195.824.000	195.824.000	-39.132.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Sekretariat DPRD		264.416.460	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	40 Orang	234.956.000	195.824.000	195.824.000	-39.132.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			264.416.460	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				85 persen	85 persen	1.981.088.692	1.064.593.876	1.332.656.356	-648.432.336			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Sekretariat DPRD		2.872.495.472	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	19 Paket	1.352.941.692	704.481.876	967.544.356	-385.397.336	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			1.402.779.027	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	67.200.000	64.800.000	69.800.000	2.600.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			154.608.960	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	140.000.000	50.000.000	50.000.000	-90.000.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			75.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
															NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan				
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	412.947.000	237.312.000	237.312.000	-175.635.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			1.165.107.485	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			75.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				85 persen	85 persen	1.792.975.424	1.618.371.000	1.646.017.400	-146.958.024			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Sekretariat DPRD		1.209.207.600	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14.329.600	21.587.200	21.587.200	7.257.600	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			52.707.600	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	167.192.400	139.141.400	145.141.400	-22.051.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			242.500.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.611.453.424	1.457.642.400	1.479.288.800	-132.164.624	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			914.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				85 persen	85 persen	941.463.200	857.445.500	939.254.620	-2.208.580			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Sekretariat DPRD		1.950.769.431	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan				
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	343.748.600	318.742.150	370.325.650	26.577.050	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			388.989.409	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				41 Unit	41 Unit	492.772.600	459.096.150	425.096.150	-67.676.450	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			577.946.155	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	104.942.000	79.607.200	143.832.820	38.890.820	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			983.833.867	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.1.5	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				85 persen	85 persen	4.156.661.649	23.999.390.912	23.999.390.912	19.842.729.263			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD		33.209.982.050	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	3.648.743.949	23.955.640.912	23.955.640.912	20.306.896.963	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			32.556.737.232	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	439.667.700	0	0	-439.667.700	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			554.418.068	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	45 Orang	68.250.000	43.750.000	43.750.000	-24.500.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			98.826.750	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan				
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase capaian pembahasan produk hukum fungsi legislasi				100 %	100 %	26.938.133.400	17.119.660.400	16.781.157.900	-16.957.882.497							9.980.250.903	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				85 persen	85 persen	6.858.529.400	3.905.533.900	3.792.064.400	-3.066.465.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD		2.937.545.996	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	3.366.490.000	1.534.282.000	1.499.252.000	-1.867.238.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			976.704.900	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	3.254.741.000	2.185.613.500	2.118.561.500	-1.136.179.500	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			1.663.139.895	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				5 Dokumen	4 Dokumen	104.999.900	77.089.900	66.602.400	-38.397.500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			278.587.571	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				5 Dokumen	5 Dokumen	132.298.500	108.548.500	107.648.500	-24.650.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			19.113.630	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran				85 %	85 %	4.202.218.000	2.409.916.000	2.268.853.000	-1.933.365.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD		1.097.452.333	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				8 Dokumen	8 Dokumen	4.202.218.000	2.409.916.000	2.268.853.000	-1.933.365.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			1.097.452.333	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				85 %	85 %	4.745.265.000	2.742.168.000	2.443.751.000	-2.301.514.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD		2.262.378.246	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				16 Dokumen	16 Dokumen	4.745.265.000	2.742.168.000	2.443.751.000	-2.301.514.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			2.262.378.246	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD				82 persen	82 persen	4.271.081.000	3.401.427.000	3.647.405.000	-623.676.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD		1.113.083.319	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	6 Dokumen	2.715.291.000	2.383.235.000	2.545.735.000	-169.556.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			610.372.522	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				42 Orang	42 Orang	314.400.000	20.000.000	20.000.000	-294.400.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			11.353.904	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				96 Orang	96 Orang	255.750.000	255.750.000	255.750.000	0	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			140.254.108	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																yang berkualitas dan berkeadilan				
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				132 Dokumen	132 Dokumen	985.640.000	742.442.000	825.920.000	-159.720.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			351.102.785	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat				85 persen	85 persen	1.737.212.500	758.087.500	736.137.500	-1.001.075.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD		716.737.632	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				4 Dokumen	4 Dokumen	1.737.212.500	758.087.500	736.137.500	-1.001.075.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			716.737.632	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD				85 persen	85 persen	599.044.000	288.152.000	278.571.000	-320.473.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD		242.101.967	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	1 Laporan	599.044.000	288.152.000	278.571.000	-320.473.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			242.101.967	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD				85 persen	85 persen	4.524.783.500	3.614.376.000	3.614.376.000	-910.407.500			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Pimpinan dan Anggota DPRD		1.610.951.410	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				20 Dokumen	20 Dokumen	2.980.510.000	2.180.565.500	2.180.565.500	-799.944.500	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata			985.316.168	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
															NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan				
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	173.680.000	246.430.000	246.430.000	72.750.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			7.096.190	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				4 Dokumen	4 Dokumen	1.154.710.000	735.422.500	735.422.500	-419.287.500	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			404.470.141	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				60 Dokumen	60 Dokumen	215.883.500	451.958.000	451.958.000	236.074.500	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan			214.068.911	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		J U M L A H							42.663.459.818	51.366.181.483,93	51.505.181.483,93	68.099.809.423,50							55.229.187.282	

Sumber: SIPD-RI Kemendagri, 2026

Setwan secara konsisten menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sebagai bagian dari proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah. Penerapan PPRG dilakukan melalui analisis gender menggunakan metode *Gender Analysis Pathway* (GAP) untuk mengidentifikasi isu, kesenjangan, factor penyebab, serta kebutuhan Perempuan dan laki-laki terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kerangka acuan kegiatan serta pengintegrasian perspektif gender ke dalam perencanaan dan penganggaran perangkat daerah. Dengan demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan mampu memberikan manfaat yang setara, memperkecil kesenjangan gender, serta mendukung terwujudnya Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Perubahan Renja dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang bersifat prioritas, termasuk penguatan kapasitas aparatur dalam implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG). Penyesuaian anggaran ini diperlukan agar kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada perencanaan awal dapat diakomodasi melalui Perubahan APBD sehingga target kinerja perangkat daerah tetap dapat tercapai secara optimal.

Pelaksanaan kegiatan yang mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) pada tahun anggaran berjalan belum terlaksana secara optimal. Kondisi tersebut disebabkan masih terbatasnya kapasitas aparatur dalam menyusun dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), khususnya penyusunan Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*/GAP), Gender Budget Statement (GBS), serta Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang responsif gender. Akibatnya, implementasi PUG dalam perencanaan dan penganggaran perangkat daerah belum dapat dilakukan secara maksimal.

Sebagai tindak lanjut, pada Perubahan APBD diusulkan pergeseran alokasi anggaran untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Analisis Gender (PUG/PPRG) dan Penyusunan KAK Responsif Gender. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kegiatan. Dengan demikian, kualitas dokumen perencanaan diharapkan semakin responsif

gender, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan Pengarusutamaan Gender.

Selain memperhatikan aspek responsive gender, pelaksanaan program dan kegiatan juga menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Setwan berupaya menyediakan informasi mengenai kebijakan program, kegiatan serta capaian kinerja melalui berbagai media informasi. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik di Sekretariat DPRD, pada perubahan anggaran dilakukan penambahan alokasi anggaran untuk media cetak dan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Penambahan anggaran tersebut dimaksudkan untuk mendukung penyebarluasan informasi mengenai kegiatan, kebijakan, produk hukum, serta kinerja DPRD kepada masyarakat melalui media cetak sebagai salah satu sarana komunikasi publik yang efektif sekaligus memenuhi kebutuhan sarana pendukung dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik. Melalui dukungan anggaran tersebut, Setwan diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan informasi yang mudah diakses, transparan, dan akuntabel serta memenuhi indikator penilaian PEKPP. Selain itu penambahan anggaran dari pergeseran sub kegiatan merupakan bentuk komitmen Setwan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan keterbukaan informasi public, dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Setwan mendapatkan penambahan anggaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebagai tindak lanjut atas kebutuhan pemenuhan belanja pegawai yang pada anggaran murni belum dapat diakomodasi secara optimal akibat keterbatasan kemampuan anggaran. Penyesuaian alokasi anggaran pada Perubahan Renja diperlukan untuk menjamin keberlangsungan pembayaran hak PPPK Paruh Waktu, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara efektif. Langkah

ini juga merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penataan tenaga non-ASN sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Selanjutnya, Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2026.



Sekretaris DPRD,


Anwar Nur Fahrudin, S.STP, M.Eng
NIP. 197910051998101002